JURNAL INSPIRASI
https://doi.org/10.35880/inspirasi.2338

Pengaruh Media Sosial, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kepercayaan Publik Terhadap Optimalisasi Partisipasi *e-Government*

Putri Zavira Nurhaliza
Politeknik STIA LAN Bandung

ABSTRACT

This research investigates the implementation of e-government in Indonesia, with a focus on the use of social media and good governance as tools to enhance public trust and interaction between the government and citizens. Using a quantitative descriptive approach, the study collected data from 101 respondents through an online survey, with demographic details predominantly representing young urban women. The data analysis results, using the Rasch Model, revealed variations in scores among respondents, with an average total score of 56.1 and a standard deviation of 9.0. Key findings include aspects such as information quality, perceived ease of use, and usefulness of social media in the context of e-government. The research also highlights that government transparency, accountability, and responsiveness in e-government services are crucial for building public trust. The results indicate that effective governance can enhance community participation and support e-government goals in providing more efficient and effective public services. The implications of this study provide valuable insights for governments to improve their e-government strategies, meeting societal expectations and enhancing the quality of services provided."

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi implementasi e-government di Indonesia dengan fokus pada penggunaan media sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari 101 responden menggunakan survei online dengan perincian demografis didominasi oleh kaum muda perempuan yang tinggal di perkotaan. Hasil analisis data dengan menggunakan Model Rasch menunjukkan variasi skor antar responden, dengan nilai rata-rata total skor sebesar 56,1 dan standar deviasi 9,0. Temuan utama mencakup aspek-aspek seperti kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kegunaan di media sosial dalam konteks e-government. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah dalam layanan e-government sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung tujuan e-government untuk memberikan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki strategi e-government mereka untuk memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.

HISTORI ARTIKEL
Diterima, 15 Februari 2024
Direvisi, 24 Maret 2024
Disetujui, 03 Mei 2024

KATA KUNCI
E-Government; Public trust; Participation; Good governance
e-Government; Kepercayaan Publik; Partisipasi; Tata Kelola pemerintah yang baik

PENDAHULUAN

Informasi, komunikasi, dan teknologi (TIK) mendorong pemerintah untuk memiliki struktur yang mampu melaksanakan kebijakan publik dengan efisien. Di Indonesia, pemerintah menganggap TIK sebagai sumber daya penting dalam mengoperasikan layanan publik karena TIK dapat mengakomodasi berbagai layanan kepada masyarakat dalam waktu relatif singkat. Penggunaan TIK yang semakin meningkat dalam penyampaian layanan publik kepada warga negara menjadikannya semakin penting dalam menyampaikan layanan pemerintah. Namun, pelaksanaan layanan publik yang efektif menggunakan TIK tetap menjadi tantangan bagi

Kontak Puttri Zavira Nurhaliza putrizavira@gmail.com
© 2024

pemerintah. Hal ini diidentifikasi melalui tingginya permintaan publik untuk memecahkan masalah dan memenuhi berbagai kepentingan layanan publik.

Salah satu produk TIK yang digunakan oleh pemerintah adalah e-government, yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang memadai kepada masyarakat. Esensi e-government berpusat pada penyampaian layanan pemerintah secara elektronik. E-government dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem manajemen informasi dan proses layanan publik serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Tujuan e-government di sektor publik adalah untuk menyediakan informasi dan layanan yang lebih baik kepada pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Akibatnya, e-government berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan dan menciptakan kebijakan, informasi, serta layanan dalam kerja sama dengan pemerintah. Berkat interaksi yang efektif dan efisien antara pemerintah dan masyarakat, e-government memainkan peran penting dalam kebijakan publik.

Survei PBB tahun 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-77 dalam Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) dan naik 11 peringkat dari tahun 2021. Survei Databox pada tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat kelima di Asia Tenggara dalam hal EGDI, dengan nilai indeks hampir 0,80. Namun, pemerintah harus mengakui apakah hal ini sesuai dengan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Meskipun peringkatnya cukup baik, implementasi e-government di Indonesia masih bisa lebih ditingkatkan. Indonesia menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan e-government, di antaranya transparansi perlindungan hukum, mekanisme implementasi yang tidak jelas, dan dukungan IT yang terbatas. Akibatnya, masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana e-government harus dilaksanakan, sehingga pendekatan deliberatif dalam pelaksanaan kebijakan publik menjadi kurang efektif.

Penelitian mengenai e-government telah menemukan bahwa tata kelola yang baik memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-government. Selain komponen TIK, tata kelola yang baik juga esensial karena akan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kinerja pemerintah terkait pelaksanaan e-government. Dengan menerapkan e-government, pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, penting untuk menyelidiki bagaimana mencapai tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam e-government untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Studi sebelumnya mencatat bahwa partisipasi dalam e-government telah meningkat dalam berbagai praktik, termasuk layanan elektronik yang mendukung partisipasi e-government, seperti e-informing dan e-consulting, budaya nasional, kesadaran pengguna, pengalaman, dan hambatan akses yang terutama berfokus pada karakteristik pengguna dan kesadaran teknologi. Keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik melalui e-government tidak hanya dilihat dari perspektif budaya, pengalaman pengguna, dan teknologi, tetapi juga dari peran pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan e-government melalui media sosial, yang berpotensi menjanjikan bagi publik.

E-Government adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Meningkatnya partisipasi publik dalam e-government menunjukkan efektivitas penerapan instrumen kebijakan. Teori kebijakan deliberatif menyatakan bahwa partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan publik adalah penting untuk efektivitasnya. Beberapa pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, harus mendapatkan kepercayaan mereka agar hal ini dapat terwujud. Mah et al. telah mengembangkan model untuk mencapai pembuatan kebijakan deliberatif berdasarkan elemen kepercayaan, yang menunjukkan bahwa kepercayaan memainkan peran signifikan dalam penerapan kebijakan pemerintah. Mendapatkan kepercayaan warga terhadap praktik pemerintah adalah tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara meningkatkan kepercayaan terhadap e-government sebagai alat implementasi kebijakan deliberatif.

Pemerintah menghadapi tantangan baru dalam meningkatkan kepercayaan publik. Terutama di era teknologi saat ini, pemerintah menghadapi dilema dalam menggunakan media sosial sebagai media efektif untuk mensosialisasikan e-government. Paparan informasi yang meningkat di media sosial dapat menciptakan beragam persepsi tentang pemerintah di kalangan masyarakat umum. Informasi negatif yang meningkat tentang pemerintah di media sosial membuatnya semakin sulit untuk menumbuhkan kesan positif tentang sosialisasi e-government yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kurangnya tata kelola yang baik dalam administrasi e-government akan menjadi prediktor bahwa warga tidak akan dapat berpartisipasi secara aktif. Mansoor menyarankan bahwa tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kebijakan e-government menentukan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, penelitian ini mengidentifikasi celah dalam implementasi e-government sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai pembuatan kebijakan deliberatif melalui pertimbangan seperti media sosial, tata kelola yang baik, dan kepercayaan.

Meskipun e-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, masih ada kesenjangan signifikan dalam implementasinya di Indonesia. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, dan resistensi terhadap perubahan dari aparat pemerintah yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Selain itu, ketidakjelasan regulasi dan perlindungan hukum terkait penggunaan e-government membuat banyak warga enggan memanfaatkan layanan ini. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara penggunaan e-government juga menjadi kendala yang memperlambat adopsi teknologi ini. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya yang lebih terpadu dari pemerintah untuk meningkatkan literasi digital, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan mensosialisasikan penggunaan e-government secara lebih efektif kepada masyarakat luas.

TINJAUAN TEORITIS

Media Sosial

Penggunaan media sosial sebagai bagian dari e-government memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hung et al. meneliti bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kualitas informasi dalam e-government. Kualitas informasi dalam konteks e-government di media sosial sangat penting, terutama ketika warga mencari informasi dan pengalaman pengguna lain yang menggunakan e-government di media sosial. Lee dan Levy serta Khan et al. (2024) mendefinisikan kualitas informasi sebagai persepsi publik tentang sumber informasi e-government yang akurat, lengkap, relevan, terkini, dan berharga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa konten informasi harus diarahkan kepada mereka yang bertanggung jawab utama atas penggunaan e-government. Warga menganggap e-government dapat diandalkan ketika informasi yang disediakan komprehensif dan akurat. Informasi e-government yang mudah diakses dan digunakan akan mendorong lebih banyak warga untuk memanfaatkannya, yang dapat meningkatkan kepercayaan. Persepsi kegunaan juga berpengaruh, karena warga yang percaya bahwa informasi e-government di media sosial dapat meningkatkan efektivitas dan manfaat bagi masyarakat cenderung lebih percaya dan berpartisipasi. Dengan demikian, kombinasi kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan persepsi kegunaan di media sosial dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap e-government.

Tata Kelola Pemerintahan

Untuk meningkatkan kemampuan negara, perlu dibentuk lembaga-lembaga yang membatasi kemampuan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. E-Government dapat memperkuat, menstabilkan, dan memperluas demokrasi dengan memberikan akses kepada warga negara terhadap informasi kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan ini dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus memperhatikan isu-isu tata kelola pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap. Transparansi, seperti yang didefinisikan oleh Sabani, melibatkan ketersediaan informasi yang relevan mengenai prosedur kinerja pemerintah dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, yang harus diimplementasikan secara transparan kepada publik. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih memahami operasi pemerintah. Informasi tersebut harus mencakup kegiatan pelayanan publik yang komprehensif, pedoman operasional untuk penggunaan e-government, anggaran dan pengeluaran pemerintah. Komunikasi yang konsisten dan menyeluruh mengenai informasi kinerja pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Selain transparansi, akuntabilitas merupakan nilai penting lainnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat untuk mencapai implementasi program e-government yang efektif, efisien, dan ekonomis. Menggunakan e-government sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan publik dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangatlah penting. Daya tanggap juga sangat penting dalam keterlibatan masyarakat melalui e-government berbasis media sosial. Hal ini memastikan bahwa pemerintah mempertimbangkan saran, pendapat, dan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan e-government. Masyarakat mengharapkan respon yang cepat dan efektif dari pemerintah ketika mereka menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka melalui e-government. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-government.

Kepercayaan Publik

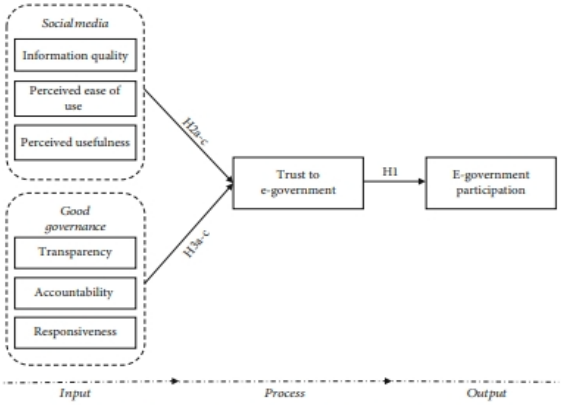
Kepercayaan sangat penting dalam menumbuhkan harapan positif tentang niat dan perilaku entitas yang dipercaya. Menurut Khan et al., (2023) Kepercayaan terhadap e-government mengacu pada sejauh mana warga negara memahami risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan penggunaan layanan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk mengandalkan dan mempercayai e-government. Dalam konteks ini, e-government sebagai objek kepercayaan memainkan peran penting dalam mengubah faktor pembentuk kepercayaan menjadi hasil yang berhubungan dengan kepercayaan, seperti peningkatan partisipasi warga negara. Harapan positif terhadap kepercayaan pada e-government diharapkan dapat mempengaruhi partisipasi ini. Khan et al. (2022) berpendapat bahwa kepercayaan mengurangi risiko dan ketidakpastian, yang menunjukkan bahwa ketika masyarakat memahami risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan e-government, kepercayaan mereka akan diperkuat. Akibatnya, kepercayaan terhadap e-government dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih besar melalui layanan pemerintah secara elektronik. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah bahwa ketika masyarakat mempercayai e-government, partisipasi mereka cenderung meningkat.

Partisipasi e-Government

Menurut Nam dan Khan et al.(2023), partisipasi e-government menggambarkan perilaku warga yang terbentuk setelah mempercayai partisipasi dalam e-government, di mana mereka berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Salah satu manfaat utama e-government adalah mendorong partisipasi warga, yang merupakan metode efektif untuk meningkatkan hubungan pemerintah-masyarakat. Sebagai

strategi untuk meningkatkan partisipasi melalui media sosial dan tata kelola yang baik, pemerintah menyediakan layanan e-government. Media sosial memudahkan orang untuk mengakses informasi dan memanfaatkan layanan e-government demi kenyamanan, kebutuhan, dan manfaat masyarakat. Oleh karena itu, media sosial dapat meningkatkan kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kegunaan. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas layanan publik juga dapat membangun kepercayaan. Dengan demikian, faktor-faktor media sosial dan tata kelola yang baik akan mendorong kepercayaan pada e-government.

Gambar 1. ***Proposed conceptual model predicting e-government participation***



Berpusat pada model teoritis yang dirujuk di atas, 15 pengalaman konstruksi disarankan sebagai bagian dari pengalaman penggunaan layanan e-government yang terlihat pada Tabel 1. Tabel 1 menyajikan konstruk dan masing-masing item yang terkait dengan persepsi e-government di Indonesia. Di bawah "Kualitas Informasi" item-item seperti kepercayaan terhadap akurasi dan ketepatan waktu dari informasi yang disediakan pemerintah melalui media sosial (N1, N2, N3) dinilai. "Persepsi Kemudahan Penggunaan" meneliti persepsi tentang layanan elektronik pemerintah yang ramah pengguna (N4, N5) dan fleksibilitas media sosial dalam mendorong hubungan yang kuat antara warga dan pemerintah (N6). "Persepsi Kegunaan" mengevaluasi keyakinan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan kualitas layanan dan pertukaran informasi mengenai e-government (N7, N8). Konstruk "Transparansi" mencakup item-item yang mencerminkan persepsi publik mengenai implementasi dan visibilitas yang transparan dari rencana dan program pemerintah yang berkaitan dengan e-government (N9, N10, N11, N12). Terakhir, "Akuntabilitas" menilai persepsi tanggung jawab pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan, dan penggunaan anggaran yang tepat dalam implementasi program e-government (N13, N14, N15). Konstruk dan item-item tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis persepsi dan ekspektasi publik mengenai efektivitas dan transparansi e-government di Indonesia.

Tabel 1. ***The Preferred Attributes***

CONSTRUCT	ITEMS	CODE
Kualitas Informasi	Saya percaya bahwa pemerintah telah menyediakan informasi yang akurat mengenai e-government melalui media sosial	N1
	Pemerintah telah menyediakan informasi terkini e-government melalui media sosial	N2
	Pemerintah telah menyediakan informasi mengenai e-government yang mudah dimengerti	N3

CONSTRUCT	ITEMS	CODE
Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)	Sebagian besar layanan e-government yang disediakan oleh pemerintah mudah untuk digunakan	N4
	Saya percaya bahwa belajar menggunakan e-government dari media sosial itu mudah	N5
	Saya menemukan media sosial sebagai cara yang fleksibel untuk mempromosikan hubungan yang kuat antara warga negara dengan e-government	N6
Persepsi Kegunaan	Menggunakan media sosial terkait layanan pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang akan saya terima tentang e-government	N7
	Penggunaan media sosial dapat meningkatkan kinerja saya dalam bertukar informasi mengenai e-government	N8
Transparansi	Rencana dan program pemerintah tentang e-government diimplementasikan secara transparan	N9
	seluruh proses rencana dan program e-government diungkapkan secara transparan	N10
	masyarakat dapat melihat dengan jelas perkembangan dan situasi e-government yang sedang berjalan	N11
	pemerintah mengungkapkan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang kinerjanya dalam mengimplementasikan e-government	N12
Akuntabilitas	Pemerintah mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat melalui penerapan program e-government	N13
	Pemerintah mematuhi peraturan dalam segala situasi dalam menerapkan program e-government	N14
	Pemerintah memastikan penggunaan anggaran yang tepat dalam kinerja yang sah dalam mengimplementasikan program-program e-government	N15

METODE PENELITIAN

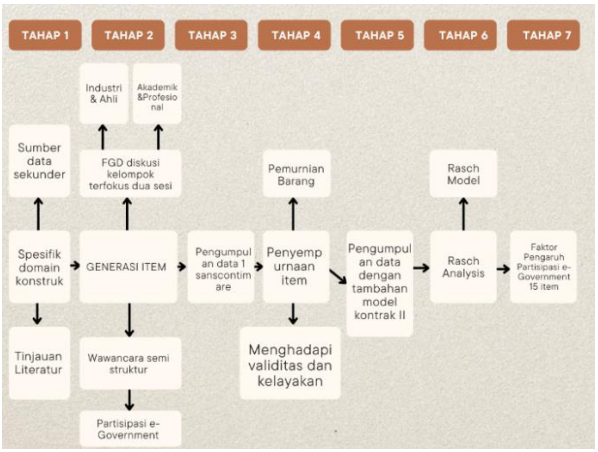
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menyelidiki fakta-fakta terkait di lapangan (Hermanto & Miftahuddin, 2021). Studi ini berfokus pada variabel pengalaman penggunaan layanan e-government di Indonesia, dengan data yang dikumpulkan melalui survei online. Populasi penelitian terdiri dari Pengguna layanan e-Government dari Usia 16 tahun sampai usia diatas 30 tahun , dengan total 101 orang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel tersebut memberikan data demografis responden dalam hal jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Di antara para peserta, 62,4% adalah perempuan, dan 37,6% laki-laki. Distribusi usia menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia antara 21-24 tahun (46,5%), diikuti oleh mereka yang berusia 16-20 tahun (36,6%), 25-30 tahun (7,9%), dan lebih dari 30 tahun (8,9%). Dalam hal tempat tinggal, 74,3% responden tinggal di daerah perkotaan, sementara 25,7% tinggal di daerah pedesaan. Perincian demografis ini menyoroti populasi sampel yang didominasi oleh kaum muda, perkotaan, dan perempuan. Para peneliti menggunakan kerangka kerja teoretis yang sistematis dan ketat untuk mencapai tujuan penelitian mereka, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Metodologi penelitian ini terdiri dari delapan tahap: Tahap 1 mendefinisikan domain dan struktur yang relevan dari pengalaman penggunaan layanan e-government dengan meninjau literatur yang ada dan sumber data sekunder (misalnya, surat kabar, laporan pemerintah). Tahap 2 melibatkan pelaksanaan dua diskusi kelompok terfokus dengan para pemangku kepentingan bisnis, akademisi, dan pakar, dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur dengan para penerima layanan. Tahap 3 meliputi administrasi awal kuesioner survei. Tahap 4 menyempurnakan dan

memvalidasi item survei berdasarkan validitas dan kelayakan, menghilangkan item yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada Tahap 5, survei kedua yang menggabungkan desain struktural yang telah disempurnakan dilaksanakan. Tahap 6 menggunakan analisis Rasch untuk mengevaluasi secara ketat variabel pengalaman layanan e-government. Terakhir, Tahap 7 diakhiri dengan penetapan versi final dari item-item faktor pengaruh partisipasi e-government.

Tabel 2. ***The Profile of Research Respondents***

Variabel	Frequency	Per cent
GENDER		
Perempuan	63	62,4%
Laki-laki	38	37,6%
Umur		
16-20	37	36,6%
21-24	47	46,5%
25-30	8	7,9%
>30	9	8,9%
Domisili		
Kota	75	74,3%
Desa	26	25,7%

Gambar 2. ***Research Design and Process***



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur jawaban responden pada skala nominal dan rating Likert, kemudian memasukkan data statistik tersebut ke dalam tabel utama atau tabulasi untuk diolah menggunakan perangkat lunak Winstep dari Model Rasch (Miftahuddin et al., 2020). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggambarkan karakteristik responden dan kualitas item pernyataan yang dikembangkan dari setiap variabel, kemudian menjelaskan hasil penelitian berdasarkan perangkat lunak Winstep. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimalisasi partisipasi e-government. Jumlah responden sebanyak 101 orang dengan teknik purposive sampling.

Teknik analisis data menggunakan Model Rasch dengan mengukur dan menganalisis

kualitas pernyataan yang dikembangkan dari setiap variabel penelitian serta mengukur kualitas responden berdasarkan jawaban terhadap pernyataan yang diberikan. Setelah itu, hasil penelitian dibahas dan disimpulkan. Kerangka penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sifat pre-eksperimental untuk mengevaluasi fenomena. Data yang dikumpulkan diproses sesuai dengan standar yang ditetapkan antara pengamatan empiris dan pengamatan kuantitatif dasar matematika. Data utama diperoleh melalui kuesioner yang dibangun dan disediakan secara online. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis menggunakan analisis Rasch yang memungkinkan data Likert yang dikumpulkan melalui kuesioner diubah menjadi interval (Bond dan Fox, 2020). (2021) Model Rasch mengubah jumlah item yang diukur pada skala Likert (yang merupakan data ordinal) menjadi skala interval yang disebut skala Likert. Skala Likert ini menggunakan "satuan probabilitas logaritmik" (logit). Kecocokan statistik item dan orang menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh sesuai, dapat diandalkan, dan mengikuti langkah-langkah dasar, serta memberikan informasi tentang kualitas pengukuran. Hasil telah ditabulasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan diolah menggunakan perangkat lunak Winstep 3.7. Data yang memiliki interval pengukuran yang dapat diterima dan memenuhi semua persyaratan validitas dan reliabilitas sistem dianalisis menggunakan Model Rasch.

Summary Statistics

Tabel 3 memberikan analisis statistik mengenai hasil tes dari suatu kelompok peserta. Nilai rata-rata (MEAN) dari skor total adalah 56,1 dengan standar deviasi (S.D.) 9,0, menunjukkan adanya variasi skor antar responden. Skor tertinggi yang dicapai adalah 73, sedangkan skor terendah adalah 15. Measure, atau estimasi kemampuan peserta, memiliki nilai rata-rata 1,71 dengan standar deviasi 1,87, rentangnya dari -7,58 (minimum) hingga 6,18 (maksimum). Error rata-rata pengukuran adalah 0,49 dengan standar deviasi 0,20. Infit dan Outfit Mean Square (MNSQ) serta Z-standard (ZSTD) untuk model menunjukkan kesesuaian data dengan model yang digunakan, dimana nilai minimum adalah 0,08 dengan ZSTD -4,2.

Lebih lanjut, tabel ini juga menunjukkan reliabilitas tes. Real RMSE (Root Mean Square Error) adalah 0,59 dan model RMSE adalah 0,53, menunjukkan tingkat kesalahan pengukuran yang cukup rendah. True SD (Standard Deviation) untuk data nyata adalah 1,78, dan untuk model adalah 1,80. Separation, yang menunjukkan kemampuan tes untuk membedakan antara tingkat kemampuan peserta, adalah 3,02 untuk real dan 3,40 untuk model, dengan reliabilitas peserta masing-masing 0,90 dan 0,92. Person raw score-to-measure correlation yang sangat tinggi, yaitu 0,99, mengindikasikan bahwa skor mentah sangat berkorelasi dengan estimasi kemampuan. Nilai Cronbach Alpha (KR-20) sebesar 0,94 menunjukkan bahwa tes ini memiliki reliabilitas yang sangat baik, memastikan bahwa hasil tes konsisten dan dapat diandalkan. Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi partisipasi e-government terukur dengan sangat baik dalam penelitian ini. Hal ini menegaskan bahwa instrumen penelitian ini efektif dalam mengidentifikasi dan mengukur variabel-variabel yang berkontribusi terhadap optimalisasi partisipasi e-government.

Tabel 3. Summary Statistics of 101 Measured (Extreme and Non-Extreme) Person

	Total		Model		Infit		Outfit	
	Score	Count	Measure	Error	MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD
MEAN	56.1	15.0	1.71	.49	0	0	0	0
S. D.	9.0	.0	1.87	.20	0	0	0	0
MAX.	73.0	15.0	6.18	1.84	0	0	0	0
MIN.	15.0	15.0	-7.58	.38	.08	-4.2	.08	-4.2

REAL RMSE .59 TRUE SD 1.78 SEPARATION 3.02 Person RELIABILITY .90
MODEL RMSE .53 TRUE SD 1.80 SEPARATION 3.40 Person RELIABILITY .92
S.E. OF Person MEAN = .19
Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .99
CRONBACH ALPHA (KR-20) Person RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .94

Rating Scale

Tabel 4 menyajikan analisis kategori untuk suatu instrumen pengukuran, seperti skala penilaian dalam tes atau kuesioner. Tabel ini menunjukkan lima kategori, dari 1 hingga 5, dengan jumlah pengamatan (OBSERVED COUNT) yang berbeda di setiap kategori. Kategori 1 memiliki 39 pengamatan (3% dari total sampel), kategori 2 memiliki 68 pengamatan (4%), kategori 3 memiliki 340 pengamatan (22%), kategori 4 memiliki 870 pengamatan (57%), dan kategori 5 memiliki 198 pengamatan (13%). Rata-rata skor observasi (OBSVD AVRGE) dan rata-rata skor yang diharapkan (SAMPLE EXPECT) untuk setiap kategori juga ditampilkan, dimana nilainya berkisar dari -2.50 hingga 3.31 untuk skor observasi dan dari -2.26 hingga 3.36 untuk skor yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa skor observasi cukup mendekati nilai yang diharapkan di seluruh kategori.

Infit dan Outfit Mean Square (MNSQ) memberikan indikasi tentang kesesuaian data dengan model Rasch yang digunakan. Nilai Infit MNSQ bervariasi antara 0.83 hingga 1.04, dan Outfit MNSQ antara 0.84 hingga 1.04, yang berada dalam rentang yang dapat diterima (umumnya 0.6 hingga 1.4), menunjukkan bahwa data fit dengan model. Kategori Threshold atau ambang batas Andrich menunjukkan titik di mana probabilitas memilih suatu kategori lebih besar dari kategori sebelumnya, dengan nilai yang bervariasi dari -4.72 (implisit untuk kategori 1) hingga 5.31 (implisit untuk kategori 5). Nilai Category Measure menunjukkan kesulitan relatif masing-masing kategori, berkisar dari -3.55 untuk kategori 2 hingga 4.19 untuk kategori 5. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa kategori dalam instrumen ini memiliki distribusi yang baik dan fit dengan model yang diharapkan, dengan nilai infit dan outfit yang berada dalam rentang yang dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dapat membedakan dengan jelas antara kategori-kategori yang ada, dan setiap kategori memberikan informasi yang valid mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi e-government. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini efektif dan andal dalam mengidentifikasi serta mengukur faktor-faktor yang berkontribusi terhadap optimalisasi partisipasi e-government.

Tabel 4*. Rating Scale Summary of Category Structure Model="R"*

CATEGORY		OBSERVED		OBSVD	SAMPLE	INFIT	OUTFIT	ANDRICH THRESOLD	CATEGORY MEASURE	
LABEL	SCORE	COUNT	%	AVRGE	EXPECT	MNSQ	MNSQ			
1	1	39	3	-2.50	-2.26	.89	.93	NONE	(-4.72)	1
2	2	68	4	-.80	-.62	.83	.84	-3.55	-2.47	2
3	3	340	22	1.10	1.05	.98	.99	-1.31	-.30	3
4	4	870	57	2.15	2.14	1.04	1.04	.67	2.45	4
5	5	198	13	3.31	3.36	1.04	1.02	4.19	(5.31)	5

Unidimensionality

Tabel 5 memberikan analisis varian dari hasil pengamatan dalam suatu instrumen pengukuran. Total varian mentah dalam pengamatan adalah 26.7 atau 100% dari keseluruhan varian. Dari jumlah ini, varian mentah yang dijelaskan oleh pengukuran adalah 11.7 (43.7%),

yang hampir sama dengan varian yang dimodelkan sebesar 42.9%. Ini menunjukkan bahwa model pengukuran yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan sebagian besar varian dalam data. Varian yang dijelaskan oleh individu (persons) adalah 7.2 (27.2%) secara empiris dan 26.7% secara model, sementara varian yang dijelaskan oleh item adalah 4.4 (16.5%) secara empiris dan 16.2% secara model.

Namun, masih terdapat 15.0 (56.3%) varian yang tidak dijelaskan secara empiris, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan varian yang tidak dijelaskan dalam model (57.1%). Varian yang tidak dijelaskan ini dipecah lebih lanjut dalam beberapa kontras: kontras pertama sebesar 2.7 (10.0%), kontras kedua 2.1 (7.8%), kontras ketiga 1.8 (6.6%), kontras keempat 1.5 (5.6%), dan kontras kelima 1.2 (4.3%). Kontras-kontras ini menunjukkan sisa-sisa varian yang mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak terukur atau noise dalam data. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar varians signifikan telah dijelaskan, temuan ini menunjukkan adanya faktor tambahan yang dapat mempengaruhi partisipasi e-government, yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan validitas instrumen dalam mengukur faktor-faktor ini secara menyeluruh.

Tabel 5. ***Unidimensionality of Standardized Residual Variance (In Eigenvalue Units)***

	-- Empirical --			Modeled
Total raw variance in observations	= 26.7	100.0%	0	100.0%
Raw variance explained by measures	= 11.7	43.7%	0	42.9%
Raw variance explained by persons	= 7.2	27.2%	0	26.7%
Raw Variance explained by items	= 4.4	16.5%	0	16.2%
Raw unexplained variance (total)	= 15.0	56.3%	100.0%	57.1%
Unexplned variance in 1st contrast	= 2.7	10.0%	17.7%	0
Unexplned variance in 2nd contrast	= 2.1	7.8%	13.9%	0
Unexplned variance in 3rd contrast	= 1.8	6.6%	11.7%	0
Unexplned variance in 4th contrast	= 1.5	5.6%	9.9%	0
Unexplned variance in 5th contrast	= 1.2	4.3%	7.7%	0

Item Measure

Tabel ini menyajikan analisis item dalam suatu tes atau instrumen pengukuran, menunjukkan berbagai statistik untuk masing-masing item. Setiap item diidentifikasi oleh nomor entri (ENTRY NUMBER) dan nama item (Item). Kolom TOTAL SCORE menunjukkan jumlah total skor yang diperoleh untuk setiap item, dan TOTAL COUNT menunjukkan jumlah responden yang menjawab item tersebut, yang dalam tabel ini semuanya berjumlah 101. MEASURE dan S.E. (Standard Error) menunjukkan estimasi kemampuan yang diukur oleh item dan kesalahan standar dari estimasi tersebut, dengan MEASURE berkisar dari -0.90 hingga 0.82 dan S.E. konsisten di sekitar 0.18.

Kolom INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ menunjukkan nilai Mean Square untuk masing-masing item, yang menggambarkan kesesuaian data dengan model Rasch yang digunakan. Nilai-nilai ini umumnya berada dalam rentang yang dapat diterima (0.74 hingga 1.29), dengan beberapa item menunjukkan sedikit deviasi. Nilai ZSTD memberikan standar z untuk INFIT dan OUTFIT, mengindikasikan seberapa jauh nilai-nilai tersebut dari ekspektasi model. Kolom PT-MEASURE CORR. menunjukkan korelasi antara skor item dengan estimasi kemampuan keseluruhan, dengan nilai yang berkisar dari 0.66 hingga 0.79, menunjukkan korelasi yang cukup tinggi. Kolom EXACT MATCH menunjukkan persentase observasi yang sesuai dengan ekspektasi model, yang berkisar dari 61.6% hingga 69.7%. Secara keseluruhan, item-item dalam tabel ini menunjukkan kesesuaian yang baik dengan model pengukuran yang digunakan,

dengan beberapa variasi kecil dalam kesesuaian individual item. Jadi, instrumen penelitian ini terbukti efektif dalam mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi partisipasi e-government.

Tabel 6. ***Item Person Statistics: Measure Order***

ENTRY	TOTAL	TOTAL		MODEL	INFIT		OUTFIT		PT-MEASURE		EXACT	MATCH	Item
NUMBER	SCORE	COUNT	MEASURE	S.E.	MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD	CORR.	EXP.	OBS%	EXP%	
10	351	101	.82	.17	1.03	.2	.99	.0	.74	.70	69.7	60.6	N10
11	357	101	.65	.17	.84	-1.1	.84	-1.0	.79	.71	62.6	61.5	N11
9	359	101	.59	.17	.95	-.3	.95	-.2	.75	.71	62.6	61.6	N9
15	359	101	.50	.17	1.08	.6	1.08	1.1	.67	.71	61.6	61.6	N15
12	362	101	.35	.17	.74	-1.8	.74	-1.7	.78	.71	65.7	61.7	N12
14	367	101	.07	.18	.98	-.1	.98	-.1	.73	.72	64.6	62.8	N14
13	376	101	-.09	.18	.95	-.3	.95	-.4	.77	.72	63.6	64.5	N13
2	381	101	-.09	.18	1.02	.2	1.02	.0	.68	.73	68.7	65.4	N2
3	383	101	-.15	.18	.77	-1.5	.77	-1.6	.77	.73	69.7	65.6	N3
1	384	101	-.18	.18	1.05	.4	1.05	.6	.66	.73	67.7	65.7	N1
4	392	101	-.45	.18	1.29	1.8	1.29	2.0	.67	.73	66.7	66.6	N4
6	394	101	-.52	.18	1.18	1.2	1.18	.9	.67	.73	63.6	66.6	N6
5	395	101	-.55	.18	.86	-.9	.86	-.9	.74	.73	67.7	66.6	N5
7	400	101	-.73	.19	.87	-.9	.87	-.8	.72	.74	66.7	66.4	N7
8	405	101	-.90	.19	1.19	1.3	1.19	1.0	.69	.74	61.6	66.2	N8
MEAN	377.7	101.0	.00	.18	.99	-.1	.99	-.1			65.5	64.2	
S.D.	16.9	.0	.54	.01	.15	1.0	.16	1.0			2.7	2.2	

Person Measure

Tabel ini memberikan analisis kemampuan individu dalam suatu pengukuran atau tes, menunjukkan statistik untuk setiap individu (Person) yang diidentifikasi oleh nomor entri (ENTRY NUMBER) dan nama (Person). Kolom TOTAL SCORE menunjukkan jumlah total skor yang diperoleh setiap individu, dengan TOTAL COUNT yang konsisten sebesar 15 untuk semua individu. MEASURE dan S.E. (Standard Error) menunjukkan estimasi kemampuan dan kesalahan standar dari estimasi tersebut, dengan nilai MEASURE berkisar dari -7.58 hingga 6.18. Ini mencerminkan berbagai kemampuan di antara individu, dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi.

Kolom INFIT MNSQ dan OUTFIT MNSQ memberikan nilai Mean Square untuk mengukur kesesuaian data dengan model Rasch, dengan INFIT MNSQ bervariasi dari 0.08 hingga 3.36 dan OUTFIT MNSQ dari 0.08 hingga 3.51. Nilai ZSTD menunjukkan standar z untuk INFIT dan OUTFIT, memberikan informasi tentang seberapa jauh nilai tersebut dari ekspektasi

model. PT-MEASURE CORR. menunjukkan korelasi antara skor individu dengan estimasi kemampuan keseluruhan, dengan nilai bervariasi dari -0.50 hingga 0.65, menunjukkan variasi dalam bagaimana skor individu terkait dengan kemampuan keseluruhan. Kolom EXACT MATCH menunjukkan persentase pengamatan yang sesuai dengan ekspektasi model, dengan nilai berkisar dari 20.0% hingga 100.0%. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam kemampuan individu dan kesesuaian dengan model, dengan beberapa individu menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dan lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel 7. *Person measure*

ENTRY	TOTAL	TOTAL		MODEL	INFIT		OUTFIT		PT-MEASURE		EXACT	MATCH	Perso
NUMBER	SCORE	COUNT	MEASURE	S.E.	MNSQ	ZSTD	MNSQ	ZSTD	CORR.	EXP.	OBS%	EXP%	
50	73	15	6.18	.77	1.02	.2	.99	.2	.12	.17	86.7	86.7	050DLK
18	69	15	4.69	.53	.95	-.1	.97	.0	.21	.26	66.7	63.0	018RPK
60	68	15	4.42	.51	3.36	5.9	3.51	6.1	-.25	.27	40.0	61.5	060RLK
42	67	15	4.16	.50	.91	-.3	.91	-.3	.20	.27	60.0	60.1	042DLK
72	67	15	4.16	.50	1.19	.8	1.21	.8	-.33	.27	33.3	60.1	072RPK
95	66	15	3.92	.49	1.61	1.9	1.60	1.9	-.23	.27	26.7	60.4	095DLK
8	65	15	3.67	.49	1.14	.6	1.15	.6	-.50	.27	53.3	61.3	008DLD
84	64	15	3.43	.49	1.21	.6	1.19	.6	.12	.27	53.3	63.9	084DLK
88	64	15	3.43	.49	1.19	.7	1.20	.7	.14	.27	53.3	63.9	088DLK
89	64	15	3.43	.49	1.00	.2	1.01	.2	.44	.27	66.7	63.9	089DLK
96	64	15	3.43	.49	1.49	1.3	1.46	1.3	.37	.27	53.3	63.9	096DLK
25	63	15	3.19	.49	.82	-.3	.83	-.3	-.36	.27	80.0	66.8	025RPK
92	63	15	3.19	.49	.59	-1.2	.59	-1.2	.17	.27	80.0	66.8	092DPK
5	62	15	2.94	.49	1.05	.3	1.06	.3	.64	.27	60.0	69.4	005DPK
13	62	15	2.94	.49	2.44	2.7	2.42	2.7	.02	.27	33.3	69.4	013DPK
29	62	15	2.94	.49	.39	-1.9	.38	-1.9	.32	.27	86.7	69.4	029DPK
67	62	15	2.94	.49	2.07	2.2	2.08	2.2	.45	.27	53.3	69.4	067DPD
68	62	15	2.94	.49	1.70	1.6	1.71	1.6	.35	.27	46.7	69.4	068R

ENTRY NUMBER	TOTAL SCORE	TOTAL COUNT	TOTAL MEASURE	MODEL S.E.	INFIT MNSQ	INFIT ZSTD	OUTFIT MNSQ	OUTFIT ZSTD	PT-MEASURE CORR.	PT-MEASURE EXP.	EXACT MATCH OBS%	EXACT MATCH EXP%	Perso
													PK
87	62	15	2.94	.49	2.05	2.1	2.04	2.1	-.11	.27	46.7	69.4	087R PK
91	62	15	2.94	.49	1.67	1.5	1.68	1.5	.39	.27	46.7	69.4	091D PK
98	62	15	2.94	.49	1.90	1.9	1.90	1.9	.65	.27	33.3	69.4	098D LD
33	61	15	2.70	.49	.68	-.7	.69	-.7	.23	.27	80.0	70.9	033R PK
45	61	15	2.70	.49	.28	-2.3	.28	-2.3	.09	.27	93.3	70.9	045D LD
64	61	15	2.70	.49	.24	-2.6	.24	-2.6	.26	.27	93.3	70.9	064D LK
73	61	15	2.70	.49	1.59	1.3	1.60	1.4	.25	.27	53.3	70.9	073R LD
83	61	15	2.70	.49	.89	-.1	.88	-.2	.64	.27	66.7	70.9	083D PK
14	60	15	2.46	.49	.08	-3.8	.08	-3.9	.00	.27	100.0	71.4	014D LK
47	30	15	-2.49	.40	3.06	4.0	2.99	3.9	.64	.33	20.0	56.5	047D PK
61	15	15	-7.58	1.84	MINIMUM MEASURE				.00	.00	100.0	100.0	061D LD
62	15	15	-7.58	1.84	MINIMUM MEASURE				.00	.00	100.0	100.0	062D LD
	56.1	15.0	1.71	.49	.99	-.5	.99	-.5			65.5	64.2	
	9.0	.0	1.87	.20	.80	2.2	.81	2.2			24.9	6.8	

PENUTUP

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kualitas item pernyataan terkait partisipasi e-government, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner online dari 101 responden. Analisis data menggunakan Model Rasch melalui perangkat lunak Winstep memungkinkan data Likert yang dikumpulkan diubah menjadi skala interval, yang mengukur kualitas pernyataan dan responden berdasarkan jawaban mereka. Hasil menunjukkan nilai reliabilitas yang tinggi dengan Cronbach Alpha sebesar 0,94, mengindikasikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.

Analisis statistik menunjukkan variasi dalam kemampuan peserta dengan nilai rata-rata skor total 56,1 dan standar deviasi 9,0. Infit dan Outfit Mean Square (MNSQ) menunjukkan kesesuaian data dengan model yang digunakan, dengan nilai yang berada dalam rentang yang dapat diterima. Hasil pengukuran item menunjukkan kesesuaian yang baik dengan model, sementara analisis kemampuan individu menunjukkan variasi yang signifikan di antara responden, dengan beberapa individu menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dan lainnya memerlukan perhatian lebih lanjut.

Tabel analisis kategori menunjukkan distribusi yang baik dan kesesuaian data dengan

model Rasch, dengan nilai infit dan outfit dalam rentang yang dapat diterima. Analisis unidimensionalitas menunjukkan bahwa model pengukuran cukup baik dalam menjelaskan sebagian besar varian dalam data, meskipun masih terdapat varian yang tidak dijelaskan yang mungkin disebabkan oleh faktor lain yang tidak terukur. Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruk transparansi yang termasuk dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kepercayaan publik dan dalam implementasinya dapat meningkatkan optimalisasi partisipasi publik. Kategori dalam instrumen ini juga memiliki distribusi yang baik dan model pengukuran dapat diandalkan untuk mengevaluasi faktor pengaruh partisipasi e-government.

DAFTAR PUSTAKA

Abied, O., Ibrahim, O., Kamal, S. N. I. M., Alfadli, I. M., Binjumah, W. M., Ithnin, N., & Nasser, M. (2022). Probing Determinants Affecting Intention to Adopt Cloud Technology in E-Government Systems. Sustainability (Switzerland), 14(23). https://doi.org/10.3390/su142315590

Agarwal, P. K. (2018). Public Administration Challenges in the World of AI and Bots. Public Administration Review, 78(6), 917–921. https://doi.org/10.1111/puar.12979

Al-Rahmi, W. M., Uddin, M., Alkhalaf, S., Al-Dhlan, K. A., Cifuentes-Faura, J., Al-Rahmi, A. M., & Al-Adwan, A. S. (2022). Validation of an Integrated IS Success Model in the Study of E-Government. Mobile Information Systems, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/8909724

Alawneh, A., Al-Refai, H., & Batiha, K. (2013). Measuring user satisfaction from e-Government services: Lessons from Jordan. Government Information Quarterly, 30(3), 277–288. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.03.001

Alhadid, I., Abu-Taieh, E., Alkhawaldeh, R. S., Khwaldeh, S., Masa'deh, R., Kaabneh, K., & Alrowwad, A. (2022). Predictors for E-Government Adoption of SANAD App Services Integrating UTAUT, TPB, TAM, Trust, and Perceived Risk. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14). https://doi.org/10.3390/ijerph19148281

Alhanatleh, H., Aboalganam, K., & Awad, H. (2022). Electronic government public value of public institutions in jordan. International Journal of Data and Network Science, 6(1), 27–36. https://doi.org/10.5267/J.IJDNS.2021.10.007

AlMulhim, A. F. (2023). The impact of administrative management and information technology on e-government success: The mediating role of knowledge management practices. Cogent Business and Management, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2202030

Almuraqab, N. A. S., Jasimuddin, S. M., & Mansoor, W. (2021). An Empirical Study of Perception of the End-User on the Acceptance of Smart Government Service in the UAE. Journal of Global Information Management, 29(6), 1–29. https://doi.org/10.4018/JGIM.20211101.oa11

Alryalat, M., Alryalat, H., Alhamzi, K., & Hewahi, N. (2023). E-Government Services Adoption Assessment from the Citizen Perspective in Jordan. International Journal of Electronic Government Research, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.4018/IJEGR.322440

Assegaff, S., Aryani, L., Sunoto, A., & Usmayanti, V. (2023). Impact of Trust on Willingness to Use E-Government Services. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics, 11(4), 1119–1128. https://doi.org/10.52549/ijeei.v11i4.5200

Aswar, K., Julianto, W., Panjaitan, I., Andreas, A., & Mubarak, H. (2024). "Discovering citizen's reaction toward e-government adoption: The role of uncertainty avoidance." Problems

and Perspectives in Management, 22(1), 366–376. https://doi.org/10.21511/ppm.22(1).2024.30

Balaskas, S., Panagiotarou, A., & Rigou, M. (2022). The Influence of Trustworthiness and Technology Acceptance Factors on the Usage of e-Government Services during COVID-19: A Case Study of Post COVID-19 Greece. Administrative Sciences, 12(4). https://doi.org/10.3390/admsci12040129

Central, E., Regional, F., & Council, P. (2004). L and U Se I Mpacts. Development, 19(November), 1–22.

Chuah, S. C., Mohamad Arshad, A. A., & Mohd Arifin, A. (2024). Adoption intention of e-government application for public health risk communication: Risk information, social media competence and trust in the government. Journal of Public Health Research, 13(1). https://doi.org/10.1177/22799036231217804

Defitri, S. Y. (2022). The role of political will in enhancing e-government: An empirical case in Indonesia. Problems and Perspectives in Management, 20(1), 69–79. https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.07

Garcia-Rio, E., Palos-Sanchez, P. R., Baena-Luna, P., & Aguayo-Camacho, M. (2023). Different approaches to analyzing e-government adoption during the Covid-19 pandemic. Government Information Quarterly, 40(4), 101866. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101866

Hariguna, T., Rahardja, U., & Sarmini, U. (2022). The Role of E-Government Ambidexterity as the Impact of Current Technology and Public Value: An Empirical Study. Informatics, 9(3), 1–19. https://doi.org/10.3390/informatics9030067

Hermanto, B., & Miftahuddin, A. (2021). Tourism experience in Indonesia: A new approach using the rasch model scale. Geojournal of Tourism and Geosites , 38(4), 1051–1056. https://doi.org/10.30892/GTG.38409-743

Hidayat Ur Rehman, I., Ali Turi, J., Rosak-Szyrocka, J., Alam, M. N., & Pilař, L. (2023). The role of awareness in appraising the success of E-government systems. Cogent Business and Management, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2186739

Hooda, A., Gupta, P., Jeyaraj, A., & Dwivedi, Y. (2023). Clarifying the Role of E-Government Trust in E-Government Success Models: A Meta-analytic Structural Equation Modeling Approach. Australasian Journal of Information Systems, 27, 1–22. https://doi.org/10.3127/ajis.v27i0.4079

Hujran, O., Al-Debei, M. M., Al-Adwan, A. S., Alarabiat, A., & Altarawneh, N. (2023). Examining the antecedents and outcomes of smart government usage: An integrated model. Government Information Quarterly, 40(1), 101783. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101783

Hutahaean, M., Eunike, I. J., & Silalahi, A. D. K. (2023). Do Social Media, Good Governance, and Public Trust Increase Citizens' e-Government Participation? Dual Approach of PLS-SEM and fsQCA. Human Behavior and Emerging Technologies, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/9988602

Iglesias-Antelo, S., López-López, V., & Vázquez-Sanmartín, A. (2021). Assessing the influence of strategic resources on the quality of life in spanish cities. Sustainability (Switzerland), 13(23). https://doi.org/10.3390/su132313048

Ilieva, G., Yankova, T., Ruseva, M., Dzhabarova, Y., Zhekova, V., Klisarova-Belcheva, S., Mollova, T., & Dimitrov, A. (2024). Factors Influencing User Perception and Adoption of E-Government Services. Administrative Sciences, 14(3). https://doi.org/10.3390/admsci14030054

Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. International Journal of

Membrane Science and Technology, 10(3), 46–54. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216

Koniyo, M. H., Giriantari, I. A. D., Sudarma, M., & Wirastuti, N. M. A. E. D. (2023). Electronic government system measurement model: a systematic testing of e-government implementation. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 32(2), 845–856. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v32.i2.pp845-856

Kurniawan, C., Pribadi, U., & Iqbal, M. (2023). the Role of E-Governance in Improving Local Governments Performance (Case Study: Sumbawa Regency). Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(3), 1139–1154. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.795

Lee, K. L., Amin, A. J., Alzoubi, H. M., Alshurideh, M., Khatib, M. El, Joghee, S., & Nair, K. (2024). Investigating the factors affecting e-procurement adoption in supply chain performance: An empirical study on Malaysia manufacturing industry. Uncertain Supply Chain Management, 12(2), 615–632. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2024.1.021

Miftahuddin, A., Hermanto, B., Raharja, S. J., & Chan, A. (2021). City branding and its variables: The evidence from indonesia. Geojournal of Tourism and Geosites , 34(1), 240–244. https://doi.org/10.30892/GTG.34132-643

Nguyen, H. N., & Tran, M. D. (2022). Stimuli To Adopt E-Government Services During Covid-19: Evidence From Vietnam. Innovative Marketing, 18(1), 12–22. https://doi.org/10.21511/im.18(1).2022.02

Purnamasari, P., Amran, N. A., Nu'man, A. H., Frendika, R., Nor, M. N. M., & Ismail, M. S. (2022). Penta-Helix Model of E-Government in Combating Corruption in Indonesia and Malaysia: Religiosity as a Moderating Role. F1000Research, 11, 932. https://doi.org/10.12688/f1000research.121746.1

Putra, R., Sobri, K. M., Azhar, & Santoso, A. D. (2022). Antecedents of e-government perceived net benefits: a study of e-filing in Indonesia. Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control), 20(5), 1016–1025. https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v20i5.22560

Rachmawati, Aswar, K., Sumardjo, M., Wiguna, M., & Hariyani, E. (2022). Personal and reliability factors affecting adoption and utilization of e-government: An effect of intention to use. Problems and Perspectives in Management, 20(2), 281–290. https://doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.23

Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. International Journal of Data and Network Science, 7(1), 49–56. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007

Saleh, A. A., & Alyaseen, I. F. T. (2021). Successful factors determining the significant relationship between e-governance system and government operational excellence. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 10(6), 3460–3470. https://doi.org/10.11591/eei.v10i6.2447

Trkman, M., Popovič, A., & Trkman, P. (2023). The roles of privacy concerns and trust in voluntary use of governmental proximity tracing applications. Government Information Quarterly, 40(1). https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101787

Vashkevich, N., Barykin, S. E., Krasnov, A., Kurochkina, A. A., Alekseeva, N., Krasnova, D. S., Kankhva, V. S., Khovalova, T. V., Mikhov, O., Buniak, V., Dzhamaludinova, M. Y., Dedyukhina, N., & Ali, M. (2024). E-government based on sustainable digitalization: The case of the Chinese social sustainability marketing technologies paradigm. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(3), 1–27. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i3.3113

Xin, Y., Dilanchiev, A., Ali, M., Irfan, M., & Hong, Y. (2022). Assessing Citizens' Attitudes and Intentions to Adopt E-Government Services: A Roadmap toward Sustainable Development. Sustainability (Switzerland), 14(22). https://doi.org/10.3390/su142215183